PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA

(Studi di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu)

SKRIPSI



OLEH AGUSTINUS BOMBO 2016210007

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI MALANG

2022

PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DALAM

MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA (Studi Di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu)

ABSTRAK

Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana

Desa adalah dana yang diperoleh dari APBN dan diberikan untuk Desa yang

dialihkan lewat Anggaran Belanja Daerah Kabupaten. Pemanfaatan dana Desa

difokuskan pada bidang perbaikan Desa dalam perbaikan sarana dan prasarana

kesehatan penduduk, upaya ekonomi serta pengetahuan sosial, serta bidang

penguatan penduduk Desa dengan menciptakan wirausahawan, dan memperluas

ekonomi pribadi lewat pengadaan atau bantuan modal. Metode yang digunakan

adalah deskriptif dengan menggunakan penelitian kuantitatif yang diharapkan dapat

memberikan gambaran pelaksanaan dan kejelasan yang tepat dan akurat mengenai

Pelaksanaan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa

Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

Kata kunci: Pengelolaan Keuangan Desa

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam memahami maksud strategi pembangunan setiap lembaga diperlukan satu acuan administrasi saat penanganan pembangunan serta strategi pemerintahan lain sehingga dapat dirasai kegunaannya oleh masyarakat. Pencapaian atau kekecewaan strategi pembangunan Desa Sumbergondo banyak diputuskan oleh tingkat acuan kepala Desa terikat prestasinya, khususnya sepanjang kepala Desa merancang, mendorong, memotivasi, menuntut, membicarakan serta perwujudannya bisa dilaksanakan dengan benar.

Desa merupakan ujung tombak organisasi penguasa Negara dalam membuat kemajuan usaha dimulai dari penguasa Negara pusat. Hal ini karena Desa dekat dengan penduduk maka strategi dari penguasa Negara lebih mudah disalurkan. Desa berperan dalam pengelolaan serta menyusun sesuai dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa yang mengatakan bahwa desa memiliki kewajiban di bidang pengelolaan dalam mensejahterakan warga desa dengan menyalurkan dana berbentuk ADD.

Ompi (2012:6) asas kedaulatan daerah memakai asas kedaulatan yang luas untuk daerah diberikan kekuasaan mengusahakan serta menyusun segala kegiatan pemerintahan eksternal yang merupakan kegiatan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, isi serta jenis kedaulatan untuk tiap daerah berbeda. Namun, pancang dalam kedaulatan daerah tetap sama, yakni pengelolaan kedaulatan daerah mesti konsisten berorientasi pada pengembangan keselamatan masyarakat melalui mengamati keperluan serta suara yang keluar dari rakyat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai penguasa daerah telah disusun dalam perwujudan bentuk sentralisasi di Indonesia, yang mana penguasa pusat mewariskan kekuasaan yang bertambah banyak untuk daerah dalam melaksanakan rangkaian metode, prosedur, dan langkah persiapan yang bisa menanggung kemajuan perbaikan (Thomas, 2013:105-124).

Pembangunan desa memiliki peran penting serta cara dalam hal perbaikan nasional serta perbaikan Kawasan lingkungan, karena terkandung makna yang merata perbaikan serta hasilnya berhubungan dengan kebanyakan warga yang domisili di pedesaan dengan upaya mengembangkan kedamaian mereka (Sofiyanto, et al, 2016:63-76).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

- Bagaimana Perencanaan Penanganan Keuangan Dana Desa Dalam Menunjang Perbaikan di Desa Sumbergondo?
- 2. Apa variabel Pendukung serta variabel Penghambat Perencanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Sumbergondo?

1.3. Tujuan Penelitian

- Untuk memahami perencanaan penanganan keuangan dana desa di Desa Sumbergondo.
- 2. Untuk memahami variabel pendukung serta variabel penghambat Perencanaan Penanganan Keuangan Dana Desa di Desa Sumbergondo.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari uraian di atas maka manfaat dari eksplorasi ini, ialah:

- Manfaat Teoritis: Hasil eksplorasi ini diinginkan mampu meninggalkan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pemahaman khususnya berkaitan dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Sumbergondo.
- 2. Manfaat Praktis: Hasil eksplorasi ini diinginkan bisa meninggalkan dedikasi serta bahan evaluasi untuk pihak terkait dalam peningkatan bidang yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Rachum. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long ikis Kabupaten Pasir, 1(1):1626-1628.
- Akhidayati, 2015. Strategi Penguatan Partisipasi Dan Kapsitas Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sekongkang Atas, Sumbawa Barat.
- Anggara, Sahya dan Sumantri. 2016 Administrasi Pembangunan (Teori dan Praktek). Bandung: Pustaka Setia.
- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 2(3), 473-485.
- Aulia, M. R. (2016). Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2015). ETD Unsyiah.
- Dewanti, E. D. W. (2015). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang).
- Eti, Kristina, 2018. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Di Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
- Herlianto, Didit, 2017. *Manajemen Keuangan Desa*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Mahmudi. 2010, Akuntabilitas Pemerintah Dalam Mengelola Sumber Daya Cratakan 10. Jakarta.
- Mardiasmo. (2012). Perpajakan. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Moleong, lexy J. 2014 *Metode Penelitian Kualitatif*.Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Noviana Okta Vitaloka. 2016. Manajemen Keuangan Desa dalam Pengelolan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-DES) di Desa Tamat Kecamatan Grujukan Kabupaten Bondowoso.

- Nova Sulastri. 2016. Efektivitas Pengelolaan alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakopodo Kecamatan Watupote Kabupaten Muna,1(1):1-50.
- Novi Karisma Rurbaroro. 2016. Analisis Akuntansi Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Panji Kidul Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, 1(1):34-39.
- Ompi, A. W. 2012. "Implementansi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi di Desa Pangu Kec. Ratahan Kab. Minahasa Tenggara".
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Sari, I. M., & Abdullah, M. F. (2017). Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung. Jurnal Ekonomi Pembangunan.
- Putra, C. K. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik, 1(6), 1203-1212.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Riyanto, T. 2015. "Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara". Jurnal Administrasi Publik, Vol. 03, No. 01, hlm: 119-130.
- Rosalinda, O. 2014. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)". Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol. 02, No. 02, hlm.
- Susilowati, N. I., Susilowati, D., & Hadi, S. (2017). Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, Dana Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. Jurnal Ilmu Ekonomi, 1.

- Setyohadi, J. D. 2012. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa Ringinanyar Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar". Skripsi Tidak Dipublikasikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sofiyanto. 2016 Jakarta. . *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa, Grafindo Pesada*
- Solekhan, Moch. 2012. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press.
- Subroto. 2009. Akuntabilitas Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI. Penerbit, Jenggala Pustaka Utama Surabaya.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Administrasi. Cetakan ketiga. Penerbit, CV Alva Beta. Jakarta.
- Sujarweni. 2015. Akuntabilitas Pemerintah Melalui Melalui Laporan Tertulis. Edisi Revisi Bumi Aksara. Jakarta
- Sulistiyani. 2004. Tranparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Maupun Penyelenggaraan Perusahaan. Kencana Prenada Media Grob. Jakarta.
- Sumiati, S. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Katalogis, 3(2).
- Thomas. 2013. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung". eJournal Pemerintahan Integratif, Vol. 01, No. 01, hlm: 51-64.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Widjaja, H.A.W, 2014. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko, 2012. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.
- Wiliam Wiersma (2016) Reaserch methods in education: an introduction.

 Massachusetts: Allyn and Bacon, Inc.
- Wirawan, Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat, 2012.